

**HASIL EVALUASI *OUTLINE* SKRIPSI FH UEU, 6 NOVEMBER 2013
(A=DITERIMA;B=DITERIMA DENGAN CATATAN;C=DITOLAK)**

No	NAMA	N.I.M	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	Orisinalitas	Kelayakan	Keterangan	Pembimbing
1	Lina Erna Ha	2010-41-140	Implementasi Perjanjian Kerja Bersama Sebagai Sarana Peningkatan Produktivitas Dan Kesejahteraan Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Pabrik Gula Trangkil, Pati Jawa Tengah	1.Penerapan Perjanjian Kerja Bersama Sebagai Sarana Peningkatan Produktivitas Dan Kesejahteraan Pekerja Berdasarkan Undann-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tengan Ketenagakerjaan? 2.Faktor Penghambat Dan Solusi Yang Mungkin Timbul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja ?	✓	A	Harus Bersifat Empiris & RM Diperbaiki	Arief Sujito
2	Achmad Saifudin Firdaus	2010-41-099	1.Legalitas Keterangan Saksi Mahkota (Saksi Yang Terdakwa Atau Tersangka Dalam Perkara A Quo) Sebagai Alat Bukti Yang Sah Berdasarkan Sistem Hukum Acara Pidana Di Indonesia 2.Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945	1.Bagaimana Hukum Acara Pidana Mengatur Tentang Alat Bukti Dalama Peradilan Pidana ? 2.Bagaimana Pengaturan Mengenai Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Peradilan Pidana? 1.Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah? 2.Bagimana Pengaturan Kewenangan Mahkamah Kontitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah sesuai Dengan Undang-	✓ -	B C	Harus Ada Studi Kasus -	Gousta Feriza -

				Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?				
3	Rizky Pratama Putri	2009-41-016	Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Atas Dasar Suka Sama Suka Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2003 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 414/Pid.B/2010/PN.Tangerang)	1.Bagimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Korban Persetubuhan Terhadap Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003? 2.Bagimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Atas Dasar Suka Sama Suka Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Dan Pasal 287 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 414/PID.B/2010/PN.Tng)	✓	A	–	Achmad Sofyan
	Rizky Pratama Putri	2009-41-016	Studi Kasus Putusan Nomor 13 K/TUN/2010 Tentang Penerapan Hukum Yang Salah Pada Sertifikat Hak Guna Bangunan	1.Bagaimanakah Pembatalan Sertifikat Hak Milik Bangunan Menurut Undang-Undang Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960)? 2.Bagiamankah Penerapan Hukum Dalam Putusan Nomor 13K/TUN/2010?	✓	B	–	T Suryanti Arief
4	Dachliawaty	2010-41-010	1.Analisa Hukum Mengenai Penerapan Ketentuan Pajak Pada Transaksi Kartu Kredit	1.Pajak Apakah yang dibebankan pada transaksi kartu kredit ditinjau dari Peraturan Perpajakan? 2.Bagaimanakah Penerapan Ketentuan Pajak Pada Transaksi Kredit?	✓	B	Judul & Permasalahan Disesuaikan	Zulfikri Aboebakar
			2.Hak Kepemilikan Satuan Rumah Susun Oleh Warga Negara Asing (WNA) Yang	1.Apakah WNA Diperbolehkan Mempunyai Hak Milik atas SATUAN Rumah Susun	–	C	–	–

			Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun	(HMSRS) Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun? 2. Bagaimana Penerapan HMRS untuk memperoleh Surat Hak Milik Atas Rumah Susun untuk WNA Yang Berkedudukan di Indonesia?				
			3. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Anak Di Bawah Umur Terhadap Anak Di Bawah Umur	1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Terhadap Anak Di Bawah Umur? 2.-	-	C	-	-
			4. Analisa Yuridis Terhadap Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska)	1. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska. Dalam mengabulkan permohonan pelaksanaan Perkawinan Beda Agama? 3. Bagaimana Kekuatan Hukum Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama?	-	C	-	-
5	Ansro Makopa HR	2010-41-034	Analisa Terhadap Upaya Pembinaan Komunitas "PUNK" Di Panti Sosial Ditinjau Dari	1. Sejauh Mana Efektifitas Pembinaan Komunitas "Punk" dipanti social Bina Sejahtera?	✓	B	Harus Bersifat Empiris & RM Diperbaiki	Fokky Fuad

			Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Studi Di Panti Asuhan Bina Sejahtera Tangerang)	2.Apakah Kendala-kendala yang dihadapi Panti Asuhan Sejahtera Dalam Penanganan Komunitas "Punk" di Tangerang?				
6	Selvi Yulya	2010-41-038	1.Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Child Sexual Abuse) Ditinjau Dari Psikologi	1.Apa Dampak Tindak Pidana yang dialami korban ditinjau dari psikologi? 2.Bagaimana Solusi Yang Dapat Diberikan Terhadap Korban? 3.Bagaimana Perlindungan Hukum Yang didapat Oleh Korban?	-	C	-	-
			2.Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 1744/Pid.B/2009/PN.Tng)	1.Apakah Syarat-syarat untuk Mengatakan Bahwa Tindakan Tersebut Merupakan Tindakan Percobaan Pencurian? 2.Bagaimanakah Pertanggung Jawaban Terhadap Kasus Percobaan Pencurian Tersebut? 3.Apakah Unsur Yang Menjadi Patokan Bahwa Tindakan Tersebut Adalah Tindak Pidana Percobaan Pencurian?	-	C	-	-
7	Ben Rajagukguk	2010-41-167	Analisis Kriminologi Viktimologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar)	1.Bagaimana Bentuk Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika? 2.Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Didalam Tindak Pidana Narkotika?	✓	B	Judul & Permasalahan Direvisi	
8	Andreas FK	2010-41-186	Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Yang Dilakukan	1.Bagaimana Konsekuensi Hukumnya Terhadap Pelaku Sehubungan Dengan Tindak	✓	B	Permasalahan Harus Lebih Spesifik	Waty Suwarty Haryono

			Oleh Ibu dan Anak Putrinya (Studi Kasus Perkara Nomor 340/Pid.b/2012/PN.Bgr)	Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378KUHP Subsider Pasal372 KUHP? 2.Apakah Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 378 KUHP Subsider Pasal 372 KUHP sudah tepat dalam Perkara Tersebut?				
9	Chindy Herawati	2009-41-008	1.Peranan Negara Dalam Pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Nomor Register Nomor 42/G/2010/PTUN-BDG Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta Dengan Nomor Register Nomor 255/B/2010/PT.TUN.Jkt)	1.Apakah Yang Dimaksud Dengan Kebebasan Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia? 2.Apakah Kasus HKBP Filadelfia Merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Atsu Kejahatan Hak Asasi Manusia? 3.Bagaimana Peranan Negara Dalam Melaksanakan Amanat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terkait dengan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara dengan Nomor Register Nomor 42/G/2010/PTUN,BDG juncto Putusan Tata Usaha Negara DKI Jakarta dengan Nomor Register Nomor 255/B/2010PT.TUN.Jkt?	✓	B	Judul & Permasalahan Lebih Spesifik	Sri Redjeki Slamet
			2.Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Menyembuyikan Identitas Narasumber Berdasarkan Undang-Undang	1.Apakah Hak Tolak yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Pers, dapat membenarkan insan	-	C	-	-

			Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 4 Ayat (4) Tentang Hak Tolak Yang Dimiliki Oleh Insan Pers Dan Pasal 165 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	<p>pers untuk memberikan terjadinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh narasumbernya tetap dapat dilakukan jika dikaitkan dengan Pasal 165 ayat(1) KUHP?</p> <p>2.Apakah perbuatan insan pers yang tidak melaporkan seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?</p> <p>3.Bagaimana Pertanggung Jawaban Hukum Untuk insan pers yang terkesan adanya pembiaran terjadinya tindak pidana yang di duga telah dilakukan oleh narasumber?</p>				
10	Phan Jaya Suherman	2010-41-174	1.Analisa Hukum Mengenai Penerapan Ketentuan Pajak Pada Transaksi Penjualan Online	<p>1.Bagaimana Ketentuan Pajak Mengatur Atas Transaksi Penjualan Online?</p> <p>2.Bagaimana Analisis Hukum Yang Dapat Didefinisikan Sebagai Penjualan Online?</p>	-	-	-	-
			2.Analisis Hukum Mengenai Penerapan Ketentuan Pajak Pada Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan (Studi Kasus Putusan Nomor 44453/PP/M.V/99/2013)	<p>1.Bagaimana Ketentuan Pajak Mengatur Atas Persyaratan Pengajuan Keberatan?</p> <p>2.Bagaimana Konsekuensi Hukum,keberatan yang tidak memenuhi Persyaratan?</p>	✓	B	Judul & Permasalahan Harus Lebih Fokus	Zulfikri Aboebakar
11	Norma Nur Indah Sari	2010-41-063	1.Analisa Putusan Bebas Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Guru Kepada Muridnya Berdasarkan Putusan Nomor 2024K/Pid.Sus/2009	1.Apakah Layak Tidak Kekerasan Dilakukan Dilembaga Sekolah Dengan Dalih Untuk Mendidik Kedisiplinan Seorang Anak Murid?	✓	B	Judul & Permasalahan Harus Lebih Fokus	Gousta Feriza

				2.Apakah Layak Putusan Bebas Ini Diberikan Kepada Seorang Guru Yang Terbukti Melakukan Tidak Kekerasan Kepada Seorang Anak Murid Disekolahnya?				
			2.Analisa Penolakan Putusan Kasasi Atas Sengketa Hak Asuh Anak Nomor 524K/AG/2012 & Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perseraian Orang Tua (Broken Home)	1.Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Perceraian Orang Tua? 2.Bagimanakah Ketentuan Perundang-undangan Yang Berlaku Semestinya Mengenai Hak Asuh Atas Anak Tersebut Berdasarkan Alasan Pengajuan Kasasi Yang Dimohonkan Oleh AS Sebagai Ayah Kandung Gendis?	-	-	-	-
12	Lilis Rusmaya	2010-41-110	1.Pelaksanaan Fungsi Penyelesaian Perselesaian Hubungan Indusrial Dalam Penanaganan Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja	1.Bagimana Pelaksanaan Fungsi Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Penanganan Putusan Hubungan Kerja? 2.Sejauh Mana Pelaksanaan Asa Peradilan Cepat,Tepat,Adil dan Murah Pada Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja? 3.Faktor-faktor Apakah Yang Menghambat Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja?	-	-	-	-
			2.Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dengan Hak-Hak Saksi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 TAHUN 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban	1.Bagaiman Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana? 2.Bagaimana Pertanggung Jawaban Lembaga	-	-	-	-

				Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Pemberian Bantuan Terhadap Saksi?				
			3.Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	1.Bagaimana Sistem Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Daerah Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010? 2.Bagaimana Penerapan Sanksi Dalam Pelanggaran Kedisilpitan Pegawai Negeri Sipil?	-	-	-	-
13	M.Rasukan	2010-41-025	Penerapan Upah Minimum Sektoral (UMSK) Di PT.EDS MANUFACTURING INDONESIA Kabupaten Tangerang	1.Bagaimanakah Dengan Penerapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Di PT.EDS Manufacturing Indonesia? 2.Bagaimanakah Faktor Penghambat Upah Minimum Sektoral Kabupaten Di PT.EDS Manufacturing Indonesia?	✓	B	Harus Bersifat Empiris & RM Diperbaiki	Dhoni Yusra